



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 17 April 2025

Halaman: 1



SPANDUK: Warga Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Kota Jogja, menolak pengukuran yang akan dilakukan PT KAI Daop 6, kemarin (16/4). Warga menolak pengukuran sebelum adanya mediasi antara PT KAI dan warga melalui Keraton.

Tetap Menolak sebelum Dimediasi Keraton

Pengukuran Rumah
Sengketa Kawasan Stasiun
Lempuyangan Batal

JOGJA - Agenda pengukuran rumah sengketa di lahan Kawasan Stasiun Lempuyangan yang akan dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Rabu (16/4) batal dilakukan. Beberapa petugas PT KAI yang mendatangi kediaman Ketua RW pun harus balik kanan karena warga bersikukuh menolak pengukuran. Sekitar pukul 09.10, dua orang perwakilan PT KAI mendatangi rumah Ketua RW 01 Bausasran

Kami siap, nanti kami akan kumpulkan warga dulu, rencana surat dikirim sore, kalau warga semua bisa kumpul."

ANTONIUS FOKKI ARDIANTO
Juru Bicara Warga

Anton Handriutomo. Satu orang mengenakan seragam tugas PT KAI Daop 6 Jogjakarta dan yang lain menggunakan batik biru dan jaket

Baca *Tetap...* Hal 7

TUNJUKKAN BUKTI:
Joni, salah satu warga terdampak rencana revitalisasi Stasiun Lempuyangan menunjukkan surat keterangan tanah, kemarin (16/4).



SUNTUT AGA TETAPAN RADAR JOGJA

Tetap Menolak sebelum Dimediasi Keraton

Sambungan dari hal 1

Pertemuan tersebut tak berlangsung lama, sekitar pukul 09.30 mereka mulai terlihat keluar dari kediaman Anton.

"Kedatangan mereka untuk menginformasikan rencana pengukuran hari ini (kemarin)," ujar Anton kepada wartawan, Rabu (16/4).

Sebagai pemangku wilayah, dirinya menampung aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan kepadanya. Empat

belas warga terdampak semuanya sepakat tetap menolak adanya rencana pengukuran oleh PT KAI. "Sebelum ada mediasi antara warga dengan PT KAI melalui Keraton Jogja," tuturnya.

Dari obrolan yang relatif singkat tersebut, Anton diberi penjelasan oleh perwakilan PT KAI, tujuan dari pengukuran mengarah pada pemberian kompensasi. Pengukuran yang batal dilakukan hari ini itu rencananya difokuskan

pada bangunan-bangunan tambahan yang telah dibuat warga. Bangunan tambahan dalam hal ini adalah bangunan yang terbuat dari dinding yang menempel di bangunan utama yakni rumah bekas Belanda. "Misalnya kamar mandi tambahan dan sebagainya, yang dari dinding bukan dari seng itu," jelasnya.

Ia belum diberitahu kaitannya dengan besaran kompensasi. Hanya saja, petugas PT KAI tersebut menitip pe-

san kepada Anton agar menyampaikan kepada warga tujuan dari pengukuran tadi.

Juru Bicara Warga Antonius Fokki Ardianto menambahkan warga tetap tegas menolak pengukuran. Perwakilan dari PT KAI meminta untuk penolakan tersebut disampaikan secara tertulis.

"Kami siap, nanti kami akan kumpulkan warga dulu, rencana surat dikirim sore, kalau warga semua bisa kumpul," tegasnya. (oso/pa/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005